

**MODERASI BERAGAMA MUHAMMADIYAH
DI KABUPATEN YAPEN**

Herlambang Dwi Prasetyo Rakhmadi ¹

¹Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

tyoherlambang97@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Yapen secara administrasi masuk dalam Provinsi Papua dan memiliki keragaman suku, ras, dan agama. Menghadapi keragaman yang ada maka diperlukan cara yang bijak dan adil yaitu moderasi beragama, moderasi beragama menjadi jalan tengah dalam menghadapi perbedaan yang ada. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat keagamaan yang berasaskan Islam telah hadir di Yapen pada tahun 2001 dengan didirikannya Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Yapen, moderasi beragama yang dilakukan oleh PDM Yapen yaitu melalui lembaga pendidikan dan menjadi ujung tombak dakwah Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah Serui menjadi awal perjuangan PDM Yapen dalam mengimplementasikan nilai moderasi beragama di Yapen serta menjadi laboratorium moderasi beragama untuk menyebarkan nilai-nilai keberagaman, gagasan kebhinekaan, dan pesan-pesan kemanusiaan.

Kata Kunci : Moderasi Beragama, Muhammadiyah Yapen, Lembaga Pendidikan

ABSTRACT

Yapen Regency is administratively included in the Province of Papua and has a diversity of ethnicities, races and religions. Facing the existing diversity, a wise and fair way is needed, namely religious moderation, religious moderation is the middle way in dealing with existing differences. Muhammadiyah as one of the religious community organizations based on Islam was present in Yapen in 2001 with the establishment of the Yapen Muhammadiyah Regional Leadership (PDM), religious moderation carried out by PDM Yapen through educational institutions and became the spearhead of Muhammadiyah propaganda. Muhammadiyah Serui Middle School was the beginning of PDM Yapen's struggle in implementing the values of religious moderation in Yapen and becoming a laboratory of religious moderation to spread diversity values, ideas of diversity, and messages of humanity.

Keywords: Religious Moderation, Muhammadiyah Yapen, Educational Institutions

PENDAHULUAN

Kabupaten Yapen adalah salah satu kabupaten yang secara administrasi berada dibawah Provinsi Papua, secara geografis terletak di selatan Kabupaten Biak Numfor dan utara Teluk Cendrawasih. Jumlah penduduk disini berjumlah 107.458 jiwa dan beragama islam sejumlah 18.930 jiwa yang artinya tidak sampai 20% dari total keseluruhan penduduk yang mayoritas beragama nasrani, maka bisa dikatakan bahwa umat islam sebagai minoritas di Yapen. Pelaksanaan ibadah didukung oleh rumah ibadah yang terletak di beberapa tempat seperti masjid berjumlah 16 bangunan dan musholla berjumlah 3 bangunan. Umat muslim disini dapat dikategorikan berdasarkan organisasi masyarakat islam yang ada di Indonesia seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Hidayatullah, Tarbiyah (PKS), serta ormas-ormas yang lain serta berasal dari berbagai macam suku di Indonesia, mayoritas berasal dari pulau Jawa dan Sulawesi sehingga menunjukkan berbagai macam warna diantara umat muslim yang ada (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Yapen, 2022*).

Islam pertama kali datang di Kota Serui, Kabupaten Yapen diperkirakan pada tahun 1895 yang dibawa oleh seorang pemuka agama yang bernama Tawakal. Menurut para sejarawan, besar kemungkinan bahwa Tawakal ini merupakan utusan dari Sultan Tidore yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam. Pada tahun 1907, penduduk Serui yang memeluk agama Islam semakin meningkat bersamaan dengan migrasi orang-orang Islam asal Tidore, Halmahera, dan Ternate ke Serui. Arus masuk orang-orang dari kepulauan Maluku ini kemudian mendiami wilayah pantai bagian utara Papua secara keseluruhan.

Islamisasi di Serui sebagaimana yang terjadi di wilayah lain, salah satunya adalah melalui pernikahan yang dimana mereka menikahi perempuan penduduk asli dan kemudian mengajak untuk masuk Islam seperti agama suaminya. Melalui akulturasi pernikahan Islam menjadi keyakinan para penduduk asli Papua, pola Islamisasi semacam ini pula yang digunakan oleh para pendakwah Islam seperti para pedagang dari Arab ketika memasuki pulau Jawa. Penduduk Muslim sebagian besar tinggal di Kampung Islam (KAMPIS) yang letaknya tidak jauh dari Masjid Darussalam, Distrik Yapen Selatan. Cikal bakal Masjid Darussalam ini adalah sebuah surau dibangun pada tahun 1921 ini yang kemudian menjadi pusat kegiatan Islam di Kabupaten Yapen, kemudian surau direnovasi menjadi bangunan masjid model panggung pada tahun 1928. Pada

masa peralihan Pemerintah Belanda kepada Indonesia yaitu tahun 1967, masjid dibangun secara permanen.

Jauh sebelumnya Nahdatul Ulama (NU) dan Hidayatullah sudah lebih dulu ada di Serui, adapun perintisan pendirian Muhammadiyah untuk daerah Yapen, mulai digagas pada tahun 1986/1987. Pada waktu itu, tiga orang Muslim asal Sulawesi yaitu Hakim Sampar Raja, M. Halim, dan Syamsul Bahri berniat untuk mendirikan Muhammadiyah, dikarenakan kesibukan pekerjaan mereka sebagai pegawai negeri sipil membuat gagasan pendirian itu menjadi terhambat. Cita-cita untuk menghadirkan Muhammadiyah di tanah Serui, akhirnya bisa direalisasikan pada tahun 2001 dengan didirikannya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Yapen.

Pendirian ini dimulai dengan rapat perdana yang berlangsung pada hari Sabtu, 8 Agustus 2001 di Mesjid Nurul Huda hingga pada akhirnya setelah melalui berbagai macam proses dari persiapan dan perizinan. Maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Yapen resmi berdiri tanggal 18 November 2001 dengan kepengurusan pada periode pertama tersebut menyepakati H. Adhan Arman sebagai Ketua dan Dirman sebagai Sekretaris. Musyawarah Daerah Pertama PDM Yapen pun berhasil diselenggarakan pada tahun 2005 (Mu'ti, A., & Haq, F. R. U, 2009).

PDM Yapen awalnya bernama PDM Yapen Waropen karena Kabupaten Waropen dulunya bergabung dengan Kabupaten Yapen, dan pada akhirnya terpisah dan berganti nama menjadi PDM Yapen dan PDM Waropen seiring dengan pemekaran kabupaten Waropen dari Yapen yang pemekernya dimulai di tahun 2003 serta Pelantikan Kepala Daerah Waropen pada tahun 2005. Pemekaran ini diikuti oleh kedua PDM untuk mempermudah administrasi, serta semakin meluaskan pengaruh Muhammadiyah ke berbagai daerah di Papua.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti hal-hal yang alamiah atau obyek natural (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan

observasi dan wawancara, serta data sekunder melalui studi literatur baik dari artikel, buku, dan website/media online.

KAJIAN TEORI

Moderasi beragama adalah cara beragama yang bijaksana dengan cara moderat atau sikap yang terbuka dalam menghadapi kemajemukan masyarakat di Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, agama, ras, dan budaya. Secara bahasa kata moderasi bermakna moderat, yaitu lawan dari berlebihan atau ekstrem dalam menghadapi keragaman dan perbedaan yang ada. Al-Washatiyah adalah padanan kata moderat dalam bahasa Arab seperti yang terdapat pada QS. Al-Baqarah (2:143), artinya berada di tengah atau pertengahan. Secara terminologi pun memiliki makna pertengahan sebagai keseimbangan (*al-tawazun*), yaitu keseimbangan antara dua arah atau dua jalan yang berhadapan ataupun bertentangan, seperti hal spiritual dengan hal material (Akhmadi, 2019).

Diperkuat juga dengan Hadits dari Abû Hurayrah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya”. Mereka bertanya: “Engkau juga, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat-Nya. Maka perbaikilah (niatmu), tetapi jangan berlebihan (dalam beramal sehingga menimbulkan bosan), bersegeralah di pagi dan siang hari. Bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam (Nurdin, 2021).

Hadits ini semakin menegaskan untuk tidak berlebih-lebihan dan juga dalam menghadapi persoalan, sebaik-baiknya adalah yang berada di tengah-tengah. Solusi dalam melihat dan menyelesaikan satu permasalahan melalui Islam moderat yakni berusaha melakukan pendekatan yang penuh kompromi terutama dalam menyikapi perbedaan yang ada, seperti perbedaan agama ataupun mazhab yang dianut. Islam moderat mengutamakan sikap bijaksana, toleransi, saling menghargai, dan tetap mempercayai kebenaran dari keyakinan agama serta mazhab masing-masing sehingga dengan adil dan bijaksana dapat disikapi, tanpa harus melakukan tindakan yang anarkis.

Moderasi menjadi cara yang sesuai dengan keragaman di Indonesia, karena moderasi lahir dari budaya di Indonesia yang dimana hidup dengan kebersamaan dan saling membaur antara agama dan kearifan lokal. Permasalahan yang muncul diselesaikan secara adil dan toleran karena nilai-nilai tersebut tertuang dalam Pancasila yang menjadi dasar negara ini. Kritik terhadap kehidupan beragama terutama dalam memahami teks-teks agama secara kaku sering menyebabkan kecenderungan untuk memisahkan para pemeluk agama pada dua sisi yang sangat berlawanan yang terkumpul dan kemudian menjadi golongan. Terdapat golongan yang terlalu fokus hanya kepada teks saja dan tidak menggabungkan unsur lain seperti kemampuan nalar/akal sehingga kitab suci hanya dipahami berdasarkan teks dan diamalkan tanpa melihat konteks, golongan ini disebut konservatif. Sisi sebaliknya dari golongan ini adalah golongan liberal yang hanya fokus pada penggunaan nalar/akal sehingga mengabaikan teks kitab suci sehingga dalam prakteknya terlampau bebas dan tidak mengikuti aturan dalam kitab suci. Baik konservatif dan liberal adalah dua sisi yang sama-sama berlebihan memahami agama.

Membuka pikiran dan sikap terhadap keberagaman menjadi kunci untuk menjalin kerja sama dengan dasar kemanusiaan, perbedaan tidak menjadi penghalang. Meyakini ajaran agama Islam mengharuskan seorang muslim menghargai agama yang lain dan tidak harus melecehkan sehingga terwujudlah perdamaian walaupun berbeda-beda seperti kota Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Moderasi tidak hanya menjadi sekedar nilai akan tetapi harus menjadi nilai yang diaplikasikan dalam kehidupan di Indonesia agar menjadi komitmen bersama yang bertujuan menjaga persatuan Indonesia seperti semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu.

Upaya untuk mewujudkan moderasi beragama ini harus disikapi dengan sikap inklusif dan bukan eksklusif. Konsep Islam yang inklusif ini tidak hanya terbatas pada pengakuan terhadap keberagaman Indonesia, akan tetapi harus diaplikasikan secara menyeluruh. Konsep ini bisa memberikan khazanah dalam pemahaman, persepsi, dan pemikiran Islam. Islam pun bisa menjadi pedoman hidup dan solusi jalan tengah yang bijak dan adil menghadapi problematika kehidupan umat serta bisa menjadi pedoman dan cara pandang yang seimbang, baik urusan hati dan akal, norma dan rasio, idealisme dan realitas, individu dan umum, serta dunia dan akhirat. Hal ini sesuai

dengan tujuan Islam diturunkan ke dunia ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam tanpa membeda-bedakan.

Menegaskan kembali bahwa moderasi beragama memiliki beberapa prinsip dasar yaitu adil, bijaksana, keseimbangan, dan toleransi serta sikap tepo sliro (tenggang rasa) yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang ditujukan untuk kedamaian dan persatuan Indonesia. Moderasi beragama bukan hanya menjadi tugas orang-orang tertentu akan tetapi seluruh masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi beragama yang dilakukan PDM Yapen yaitu melalui ujung tombak dakwah Muhammadiyah adalah lembaga pendidikan. PDM Yapen memutuskan untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Serui pada tahun 2002, setahun setelah berdirinya PDM Yapen di Serui. Tujuan pendirian SMP ini untuk mawadahi banyaknya lulusan Sekolah Dasar (SD) yang berminat melanjutkan jenjang pendidikan akan tetapi tidak dapat tertampung oleh SMP yang ada, sehingga pendirian SMP dinilai lebih efektif dan tepat dengan kebutuhan masyarakat. Awalnya, proses kegiatan belajar dilaksanakan di Madrasah Islamiyah (MI) Darussalam yang berlokasi Jalan Sam Ratulangi hingga tahun ajaran 2003/2004, SMP Muhammadiyah serui mulai pindah ke gedung baru yang terletak di Jalan Kamboja dan diresmikan oleh Bupati Yapen pada 21 Juli 2003. Gedung SMP ini menjadi milik Muhammadiyah dan berdiri di atas sebidang tanah yang diwakafkan oleh H. Najmuddin.

Proses berdirinya SMP Muhammadiyah Serui ini memiliki dinamika dalam perjalanannya baik peluang maupun tantangan seperti yang terjadi pada proses penimbunan untuk pembangunan fondasi, seorang yang beragama Kristen bernama Tony ikut memberikan bantuan dan juga sebelumnya ikut membantu pembangunan Taman Kanak-Kanan (TK) NU Serui. Keterlibatan Tony dalam pengembangan lembaga pendidikan Muhammadiyah ini menunjukkan bahwa moderasi beragama yaitu saling tolong menolong antar komunitas agama menjadi nyata. Lebih dari itu, kemunculan Muhammadiyah tidak dipandang sebagai ancaman bagi pemeluk agama lain di Serui.

Terdapat juga tantangan dan hambatan yang dihadapi yaitu penolakan oleh keluarga Wayan Kawe terhadap pembelian tanah yang dibeli oleh PDM Yapen. Penolakan ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor tertentu, seperti motif ekonomi, sentimen agama, suku, politik, dan budaya. Tantangan berdakwah ini tidak hanya dialami oleh Muhammadiyah saja, tapi juga ormasi Islam yang lain pun merasakan Hidayatullah. Hidayatullah Serui merasakan kesulitan saat mencari tempat untuk membangun tempat ibadah bahkan pada kasus yang lain pernah membeli tanah dan sesuai mekanisme terdapat surat dan sertifikat yang lengkap akan tetapi dipermasalahakan.

Biasanya sebuah sekolah yang didirikan dengan label Islam walaupun di daerah yang mayoritas beragama selain Islam masih hanya menerima siswa yang beragama Islam. Hal yang berbeda terjadi di SMP Muhammadiyah Serui yang dimana membuka pintu yang lebar bagi siswa non Muslim, mayoritas siswa tersebut beragama Kristen Protestan dan Katolik bahkan mayoritas siswanya merupakan non Muslim. Proses pembelajaran pun mengakomodir para siswa non Muslim dengan adanya mata pelajaran Kristen dan Katolik yang diampu oleh guru non Muslim juga. Kebijakan ini menimbulkan animo yang cukup tinggi di masyarakat non Muslim untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Muhammadiyah (Ayati, 2022).

Kebijakan SMP Muhammadiyah Serui untuk membuka pintu bagi semua agama dilakukan bukan tanpa alasan, kebijakan ini diambil dengan berdasarkan pada konteks keragaman masyarakat yang ada di Serui. Secara praktek pun, sekolah swasta yang berlabel Islam akan sangat sulit berkembang dan tidak diterima masyarakat jika tampil eksklusif. Tujuan sekolah tidak hanya fokus untuk mendapatkan siswa yang banyak akan tetapi diiringi dengan kualitas yang harus diberikan, SMP Muhammadiyah Serui berpandangan bahwa tujuan pokok penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah adalah dalam rangka membantu tugas pemerintah dalam memberikan hak pendidikan kepada semua warga negaranya (*education for all*).

Seiring dengan perkembangan zaman, PDM Yapen tidak hanya mendirikan SMP Muhammadiyah Serui saja akan tetapi mulai mendirikan lembaga pendidikan yang lain yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Serui pada 23 April 2004 agar para siswa lulusan SMP dapat melanjutkan pendidikan dan memiliki keahlian dalam menghadapi dunia kerja. Pada 31 Maret 2022, PDM Yapen melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan

Universitas Siber Muhammadiyah untuk mendirikan Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) di Yapen agar siswa lulusan SMK/SMA dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi.

Keragaman di Serui yang disikapi oleh PDM Yapen dengan mendirikan lembaga pendidikan adalah cara yang tepat karena bisa menjadi “laboratorium moderasi beragama”, sekolah sebagai institusi pendidikan bisa menumbuhkan pola pikir tentang moderasi beragama dengan pandangan kekayaan akan perbedaan yang dimiliki Kabupaten Yapen. Sekolah menjadi poin penting karena dasar moderasi beragama atas filosofi universal dan hubungan sosial bisa dibangun dari sekolah melalui ruang dialog yang terjadi di kelas, para pengajar bisa memberikan pemahaman bahwa moderasi beragama adalah kunci kedamaian dan sekolah bisa menjadi awal tersemainya nilai-nilai keberagaman, gagasan kebhinekaan, dan pesan-pesan kemanusiaan demi persatuan Indonesia terkhusus kedamaian dan kemajuan di Papua (Sutrisno, 2019).

Dengan demikian, model pendidikan yang dikembangkan SMP Muhammadiyah adalah pendidikan berorientasi pluralisme. Oleh karenanya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa tersekat oleh faktor agama, etnis, dan budaya, termasuk di sekolah Muhammadiyah, sehingga sekolah Muhammadiyah tidak hanya menjadi solusi untuk umat Islam tapi juga seluruh umat beragama yang ada di Yapen. PDM Yapen melalui lembaganya mengambil jalan tengah yang dimana melihat potensi dan kondisi yang ada di Yapen, kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai Muhammadiyah sehingga ketemulah titik tengah dalam mengambil kebijakan.

KESIMPULAN

Kabupaten Yapen yang merupakan bagian dari Provinsi Papua ini mayoritas beragama Kristen/Katolik. Umat Islam pun menjadi minoritas di kabupaten ini dan terbagi menjadi beberapa ormas, salah satunya adalah Muhammadiyah yang mendirikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Yapen Waropen pada tahun 2001 yang pada akhirnya menjadi PDM Yapen karena program pemekaran Kabupaten Waropen.

PDM Yapen dalam menghadapi kemajemukan atau multikulturalisme yang ada di Papua dilakukan dengan bijak yaitu dengan pendekatan moderasi beragama yang dimana mencari titik temu antara nilai-nilai Muhammadiyah dengan kondisi yang ada di Yapen, sehingga dilakukan melalui ujung tombak yaitu dakwah melalui lembaga pendidikan yang dilakukan secara inklusif sehingga tidak hanya umat Islam yang dapat mengenyam pendidikan akan tetapi non Muslim yang ada pun dapat menerimanya.

Hal ini dilakukan dengan beberapa faktor seperti pluralisme dan toleransi yang tinggi di Yapen dan jika pendidikan dilakukan secara eksklusif atau tertutup maka akan sedikit yang berminat untuk mendapatkan pendidikan sehingga diperlukan pendidikan yang terbuka untuk semua melihat tingkat pendidikan di Papua yang sangat kurang.

REFERENSI

- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Ayati, N. (2022). Konsep Pendidikan Multikultural di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah : *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 5(1).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Yapen*. (n.d.). <https://kepulauanyapenkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/ebbe641bc174d93f38c7bbf9/kabupaten-kepulauan-yapen-dalam-angka-2021.html>
- Hamid, I. Al. (2013). Islam Politik di Papua: Resistensi Dan Tantangan Membangun. *Millah*, XII(2), 441–459.
- Mu'ti, A., & Haq, F. R. U. (2009). Kristen Muhammadiyah: konvergensi Muslim dan Kristen dalam pendidikan. Al-Wasat Publishing House.
- Nuridin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18(1), 59. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>
- Suardi Wekke, I. (2013). MASJID DI PAPUA BARAT: Tinjauan Ekspresi Keberagamaan Minoritas Muslim dalam Arsitektur. *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 15(2), 124. <https://doi.org/10.18860/el.v15i2.2762>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV

Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323–348. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>

Wekke, I. S. (2015). Antara Tradisionalisme dan Kemodernan: Pembelajaran Bahasa Arab Madrasah Minoritas Muslim Papua Barat. *Tsaqafah*, 11(2), 313. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i2.271>